

ANALISIS PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI SRI LANKA TERHADAP TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MAHINDA RAJAPAKSA

Ida Ayu Bulan Utami Arti¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A.A Bagus Surya Widya
Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dayubulan98@gmail.com¹, rainypriadarsini@yahoo.com², aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

The event of Mahinda Rajapaksa elected as a president affected Sri Lanka's foreign policy towards Tiongkok. Historically, Sri Lanka has a very strong foreign policy compass oriented towards the Western countries in political, economic and military sectors. However, during the presidency of Mahinda Rajapaksa in 2005 - 2015, Sri Lanka showed a shift in their political orientation by building a closer relationship with Tiongkok in various sectors and limiting their contact with the old Western allies. This research is written to find and describe all of the factors that influenced the foreign political shift of Sri Lanka towards Tiongkok during the presidential era of Mahinda Rajapaksa. The writer of this research uses Theory Determinants of Foreign Policy by William D. Coplin.

Keywords: Determinants of Foreign Policy, Sri Lanka, Tiongkok, Mahinda Rajapaksa

1. PENDAHULUAN

Dinamika hubungan luar negeri Sri Lanka sudah dimulai sejak menjadi negara yang berdaulat tahun 1948. Sri Lanka merupakan negara yang diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Oleh karenanya, hubungan luar negeri Sri Lanka didominasi oleh hubungannya yang erat dengan negara-negara Barat. Kebijakan Perdana Menteri Sri Lanka, D.S Senanayake, melalui perjanjian *British – Sri Lanka External Affair and Defense Agreement* tahun 1947 juga telah mengikat hubungan Sri Lanka dengan blok Barat. Peningkatan hubungan kedua negara tercermin dari keanggotannya dalam

British Commonwealth of Nations (Nayani,2013).

Pada periode Perang Dingin, hubungan Sri Lanka dengan blok Barat juga semakin terlihat melalui kehadiran Amerika Serikat di Pelabuhan Trincomalee. Pelabuhan tersebut dijadikan sebagai lokasi ideal bagi banteng pertahanan AS dalam memperlancar serangan nuklir terhadap Uni Soviet (Chris Smit,2003). Sejak saat itu, letak geografis Sri Lanka yang strategis menyebabkannya berinteraksi secara intensif dengan negara-negara Barat. Kehadiran Amerika Serikat yang lebih luas di Sri Lanka juga ditunjukkan

melalui *United State Agency for International Development* (USAID). Keadaan yang demikian membuat Sri Lanka sangat bergantung dengan Barat.

Pada tahun 2005, Mahinda Rajapaksa muncul sebagai pemenang baru dalam pemilu Sri Lanka. Secara bersamaan, momentum tersebut juga menandai terjadinya perubahan politik luar negeri Sri Lanka terhadap negara-negara di dunia. Pada masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa yang berlangsung selama dua periode yaitu dari tahun 2005-2015, Sri Lanka secara bertahap merubah arah orientasi politik luar negerinya. Menurut sejarah, pelaksanaan politik luar negeri Sri Lanka sangat condong ke Barat dan pada era ini justru bergeser ke Timur melalui peningkatan hubungan bilateral dengan Tiongkok secara signifikan.

Data Kementerian Keuangan dan Perencanaan Sri Lanka menunjukkan total investasi Tiongkok di Sri Lanka selama tahun 1971-2012 adalah 5,05 Miliar US\$, namun sebanyak 4,76 Miliar US\$ yang mewakili 94 persen dari keseluruhan diinvestasikan selama 2005-2012 di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa (Kalegama dalam Surendra,2017). Peningkatan kerjasama Sri Lanka-Tiongkok juga terjadi dalam bidang pertahanan militer melalui pengadaan persejantaan Tiongkok untuk militer Sri

Lanka. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), selama tahun 2005-2012 Sri Lanka menjadi pasar senjata terbesar kedelapan di Tiongkok (Surendra,2017).

Dengan melihat bentuk kerjasama dalam berbagai bidang yang berusaha dijalin kedua negara menunjukkan bahwa Sri Lanka secara pro-aktif melakukan penguatan hubungan luar negeri yang signifikan dengan Tiongkok. Padahal sejak Sri Lanka meraih kemerdekaannya tahun 1948, peran Tiongkok di Sri Lanka sangat terbatas karena Sri Lanka bergantung dengan Barat. Oleh karenanya, pelaksanaan politik luar negeri Sri Lanka pada masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa telah menyiratkan bahwa terjadi perubahan orientasi politik luar negeri dari *west oriented* menjadi lebih bersifat *east oriented*. Perubahan ini menarik untuk diteliti lebih jauh karena tentunya didorong oleh sejumlah alasan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mempertanyakan “Apa faktor-faktor yang mendorong Sri Lanka merubah orientasi politik luar negeri melalui penguatan hubungan bilateral dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa?”

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kepada faktor-faktor yang mendorong perubahan orientasi politik luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur pertama berjudul *Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki Terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan PM. Nicemettin Erbakan* yang ditulis oleh Dewi Retno Wulandari (2003). Secara umum, tulisan ini menjelaskan bahwa Turki mengalami pergeseran politik luar negeri sejak Erbakan resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Turki.

Di era pemerintahan PM. Erbakan, arah politik luar negeri Turki mengalami perubahan dari pro terhadap Amerika Serikat menjadi anti-Amerika Serikat, anti-Barat, dan justru mengedepankan *Islamic Oriented* dengan meningkatkan hubungan luar negeri bersama negara-negara Islam di Timur Tengah. Dalam mengidentifikasi perubahan politik luar negeri tersebut, tulisan ini menggunakan Teori Determinan Politik Luar Negeri.

Secara keseluruhan, tulisan Dewi (2003) memiliki kesamaan karena

menganalisis perubahan orientasi politik luar negeri suatu negara. Selain itu, tulisan ini juga membantu penulis untuk melihat bahwa perubahan politik luar negeri suatu negara terjadi karena didorong oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal.

Literatur kedua yang digunakan dalam penelitian ini berjudul *Sri Lanka in 2009 from Civil War to Political Uncertainties* yang ditulis oleh Jayadeva Uyangoda (2010). Secara umum, tulisan ini menjelaskan bahwa orientasi politik luar negeri Sri Lanka di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa telah mengalami transformasi yang dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya, terutama sejak berakhirnya Perang Sipil pada tahun 2009

Tulisan ini dapat membantu untuk menganalisa pola-pola yang digunakan oleh Presiden Mahinda Rajapaksa dalam merubah sikap politik luar negerinya karena dilatarbelakangi kepentingan ekonomi dan politik Sri Lanka. Sehingga nantinya, ini membantu penulis dalam menjelaskan secara tepat mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data skunder. Tingkat analisis penelitian ini adalah tingkat negara, dimana Sri Lanka menjadi objek penelitian ini. Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis data *online* dan analisis dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Luar Negeri Sri Lanka-Tiongkok Sebelum Masa Pemerintahan Mahinda Rajapaksa

Sejak meraih kemerdekaannya, pelaksanaan politik luar negeri Sri Lanka menunjukkan kurangnya hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada hubungan Sri Lanka-Tiongkok yang melalui sejarah panjang dan dikatakan terkesan tidak begitu baik.

Perdana Menteri pertama Sri Lanka, D.S Senanayake melakukan hubungan diplomatik yang sepenuhnya terikat dengan Inggris dalam sistem aliansi blok Barat. Kondisi ini tidak terlepas dari Konstitusi Soulbury 1947, terkait pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan Sri Lanka sebagai entitas otonom namun tetap mempertahankan perlindungan kerajaan Inggris dalam urusan pertahanan

dan hubungan eksternalnya (Asanga Wileka dan Harshan Kumarasingha, 2016).

Pada tanggal 4 Februari 1948, Sri Lanka berhasil memperoleh kemerdekaan tanpa adanya gerakan nasionalis dan diberikan status *dominion*. *Dominion* merupakan status yang diberikan untuk negara jajahan Inggris dan merdeka, namun tetap mengakui raja/ratu Inggris sebagai kepala negara.

Kuatnya hubungan Sri Lanka-Inggris juga tercermin dari tercapainya perjanjian strategis *British - Sri Lanka External Affairs and Defense Agreement*. Perjanjian tersebut ditujukan untuk menutupi kelemahan pertahanan dan kekurangan angkatan bersenjata Sri Lanka, terlebih berada pada jantung strategis di Samudera Hindia.

Selain itu, kurangnya pengalaman Sri Lanka di kancah internasional memaksa Inggris untuk memfasilitasi dan mewakili Sri Lanka di tingkat internasional dalam konteks hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Faktor-faktor ini semakin menjelaskan alasan Perdana Menteri D.S Senanayake melaksanakan politik luar negeri yang sangat berpegang teguh terhadap Inggris, Sri Lanka bahkan disebut sebagai koloni teladan Inggris (Neil De Votta, 2014).

Pada saat yang sama, kondisi tersebut telah mendorong negara-negara komunis seperti Tiongkok maupun Uni Soviet juga skeptis dalam melihat Sri Lanka dan dianggapnya sebagai boneka Barat. Selain itu, muncul ketegangan dan kritikan keras yang datang dari Tiongkok karena menilai kebijakan pro-Inggris ini telah menyebabkan Sri Lanka menerima status yang kurang dari kemerdekaan sejati (George Lerski, 1974).

Meskipun sejarah menunjukkan hubungan yang buruk dari Sri Lanka - Tiongkok, namun sempat membaik pada masa pemerintahan S.W.R.D Bandranaike dan Sirimavo Bandranaike. Secara keseluruhan, pemerintahan Bandaranaike telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan politik luar negeri Sri Lanka dengan mengadopsi prinsip *non-alignment*. Ini mengartikan bahwa Sri Lanka tidak seharusnya condong terhadap satu blok tertentu yaitu Barat, melainkan juga memberikan porsi yang sama dengan blok Timur. Kondisi ini mendorong terjadinya penandatanganan perjanjian *Rubber-Rice* pada tahun 1957 dan menjadi perjanjian pertama yang pernah ditandatangani oleh Sri Lanka dan Tiongkok.

Sayangnya, hubungan yang berangsur membaik antara Sri Lanka dan

Tiongkok tidak bertahan lama. Jatuhnya S.W.R.D Bandranaike dan Sirimavo Bandaranaike sebagai Perdana Menteri, turut menjadi titik putusnya hubungan baik kedua negara. Perdana Menteri Dudley Senanayake just berhasil melakukan normalisasi hubungannya dengan Barat yang sempat mengalami pembekuan diplomatik akibat keputusan Sirimavo dalam menasionalisasi perusahaan minyak milik Inggris dan Amerika Serikat di Sri Lanka.

Dalam perjalanannya, hubungan luar negeri Sri Lanka-Tiongkok yang telah dibuka pada tahun 1957 mengalami stagnasi serta tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan dalam sela-sela tahun tersebut dipimpin oleh Presiden pertama Sri Lanka yaitu J.R. Jayawardene yang berasal dari partai UNP dengan kepemimpinan selama dua periode yaitu 1977-1989. Walaupun tidak menutup kerjasama dengan Tiongkok, namun hubungan luar negeri kedua negara sangat lesu, dan dalam perjalanannya tetap memprioritaskan hubungannya dengan Barat. Selain itu, kemunduran hubungan kedua negara juga dikarenakan keterlibatan Tiongkok dalam Perang Sipil muncul tidak terlalu penting.

Disisi lain, Tiongkok juga menjadi mitra dagang yang kurang penting bagi Sri Lanka. Mitra dagang Sri Lanka tujuan ekspor dan impor utama Sri Lanka ditempati oleh Inggris, India dan Amerika Serikat (Jayawardena,2010). Sejak tahun 1971, Sri Lanka mendapat banyak keuntungan dalam menjalin perdagangan dengan negara Barat melalui skema (GSP+) sebab Sri Lanka dapat memperluas pangsa pasarnya tanpa mendapat bea masuk. Hal ini membuat Sri Lanka sangat terkiat dengan Barat.

Politik Luar Negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Mahinda Rajapaksa

Terpilihnya Mahinda Rajapaksa sebagai Presiden Sri Lanka telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi politik luar negeri Sri Lanka. Secara konsisten, Mahinda Rajapaksa mengambil langkah-langkah yang kongkrit dengan Tiongkok untuk mendorong hubungan kedua negara ke level yang lebih tinggi baik dalam bidang ekonomi, militer dan diplomatik. Peningkatan tersebutlah yang menjadi menjadi sinyal kuat bahwa telah terjadi pergeseran politik luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok.

Di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa telah terjadi hubungan

diplomatik yang begitu hangat dengan Tiongkok. Sejak tahun 2005-2015, Sri Lanka tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, dan Mahinda Rajapaksa secara resmi melakukannya selama 14 (empat belas) kali (Ravindra Deyshappriya,2016). Kondisi yang demikian tentu tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan khusus bahwa Tiongkok memiliki posisi strategis dalam politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Mahinda Rajapaksa.

Pada tahun 2007 menjadi “Tahun Persahabatan Tiongkok-Sri Lanka” karena berhasil menjadi puncak bagi hubungan yang lebih kuat melalui pencapaian berbagai kesepakatan dan dikemas dalam momen perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara (Nilanthi Samarayanake,2011). Sebagai hasil dari kunjungan kedua negara ini, Sri Lanka-Tiongkok berhasil meningkatkan kerjasama bilateralnya menjadi Kemitraan Strategis Komperhensif. Kerjasama ini difokuskan pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, pariwisata, hingga solusi terhadap Perang Sipil yang terjadi.

Hal penting lainnya yang menunjukkan kuatnya hubungan Sri Lanka-Tiongkok di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa tercermin dari

pengakuan Sri Lanka atas kebijakan “*One China Policy*”. Mahinda Rajapaksa dalam kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 2014 telah menyatakan secara tegas bahwa sikap pemerintah Sri Lanka tidak akan pernah berubah dalam mendukung serta mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah berdaulat, dan bukan Taiwan (Surendra Kumar, 2017). Selain itu, Mahinda Rajapaksa juga sepakat untuk mempromosikan proyek *21st Century Maritime Silk Road* atau Jalur Sutra Maritim Tiongkok.

Perubahan Politik Luar Negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok pada Masa Pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa

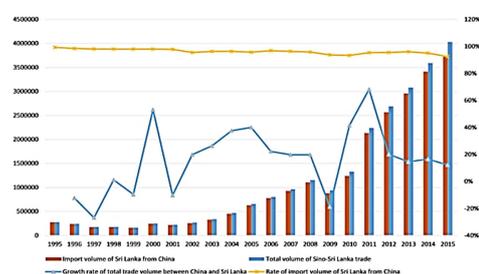
Perubahan pelaksanaan politik luar negeri yang signifikan ini telah mendorong terjadinya transformasi yang menyentuh hampir semua sektor penting di Sri Lanka. Bentuk interaksi yang kuat telah dilakukan Sri Lanka-Tiongkok era Mahinda Rajapaksa, khususnya pada sektor ekonomi dan militer.

Terpilihnya Mahinda Rajapaksa sebagai Presiden Sri Lanka menjadi titik awal hubungan baru bagi Sri Lanka-Tiongkok khususnya dalam sektor ekonomi. Pada tahun 2005, kedua negara berhasil menandatangani *Agreement of*

Further Deepen Bilateral Economic and Trade Relations between China and Sri Lanka Government sebagai tanda bahwa akan dilakukannya kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral secara lebih mendalam (Yanfang Li, 2017).

Sejak saat itu, hubungan ekonomi Sri Lanka-Tiongkok memasuki tahap kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu indikator yang dapat membuktikannya adalah melalui volume perdagangan bilateral kedua negara yang mengalami peningkatan secara tajam. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui Gambar 3.1 yang memuat Grafik Peningkatan Perdagangan Bilateral Sri Lanka dan Tiongkok. Grafik tersebut menunjukkan impor Sri Lanka dari Tiongkok meningkat dari 270 juta USD menjadi 3,7 miliar USD sementara ekspor Sri Lanka ke Tiongkok meningkat dari 2 juta USD menjadi 300 juta USD.

Gambar 3.1 Grafik Peningkatan Perdagangan Bilateral Sri Lanka-Tiongkok



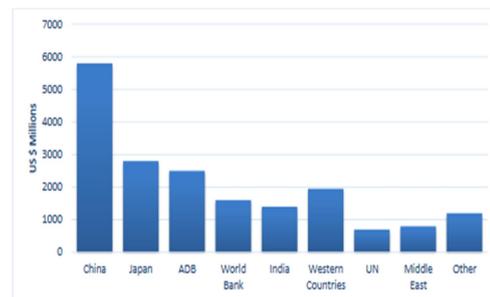
Sumber: Yangfang Li, (2017)

Meskipun sudah menunjukkan kemajuan pesat, hubungan ekonomi kedua negara juga semakin diwarnai dengan berbagai upaya Mahinda Rajapaksa dalam mendorong investasi Tiongkok pada berbagai proyek infrastuktur di Sri Lanka. Aliran dana asing (*foreign financing commitment*) Tiongkok di Sri Lanka baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), pinjaman dan bantuan luar negeri, maupun hibah terus tumbuh secara pesat pada periode pemerintahan Mahinda Rajapaksa. Apabila ditinjau dari perspektif historis, selama periode panjang yaitu sejak 1971-2004, aliran dana asing Tiongkok di Sri Lanka kurang dari 200 juta USD, namun mengingkat signifikan menjadi 5,6 Miliar USD selama tahun 2005-2013.

Berkembangnya aliran dana asing Tiongkok di Sri Lanka pada periode pemerintahan Mahinda Rajapaksa berhasil mengalahkan posisi mitra tradisional Sri Lanka khususnya negara-negara Barat. Berdasarkan Gambar 3.2 yang memuat Grafik Komposisi Aliran Dana Asing berdasarkan Mitra Utama Sri Lanka tahun 2006-2013 menunjukkan selama periode tersebut, komitmen pembiayaan asing Tiongkok terhadap Sri Lanka sebesar 5,6 Miliar USD. Kondisi ini menandai telah terjadi perubahan pada periode pemerintahan Mahinda Rajapaksa sebab mitra tradisional Sri

Lanka khususnya *Western Countries*, yang dahulunya menunjukkan komitmennya secara finansial begitu kuat jutsru menjadi sangat lemah di Sri Lanka.

Gambar 3.2 Grafik Peningkatan Aliran Dana Asing Tiongkok di Sri Lanka Periode 2005-2013



Sumber: Ravindra Deyshappriya, (2016)

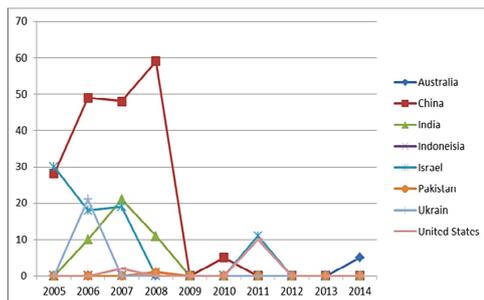
Selain itu, perkembangan yang paling menonjol dalam hubungan Sri Lanka-Tiongkok pada sektor ini juga tercermin dari kemunculan Tiongkok sebagai satu-satunya negara pengeskor senjata terbesar ke Sri Lanka. Hal yang demikian belum pernah terjadi, sebab sejarah menunjukkan bahwa kerjasama militer Sri Lanka-Tiongkok dulunya tampak dibatasi. Dalam menilai pentingnya hubungan militer antara Sri Lanka-Tiongkok dapat dilihat melalui aliran senjata Tiongkok ke Sri Lanka.

Hal tersebut terlihat dari Gambar 3.3 yang memuat grafik aliran transfer senjata ke Sri Lanka dari pemasok internasional terbesar pada tahun 2005-2014 menunjukkan bahwa Tiongkok hadir sebagai negara pemasok senjata

Gambar 3.3
dari Pema
tahun 20

Sumber

terbesar di Sri Lanka. Waktu peningkatan tersebut terjadi secara signifikan dalam kurun waktu 2005-2008.



Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Politik Luar Negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa

Dalam mengidentifikasi perubahan politik luar negeri Sri Lanka, penulis menggunakan Teori Determinan Politik Luar Negeri dari William D. Coplin yang menyebut bahwa terdapat empat determinan/faktor yang menjadi “penyebab” perilaku politik luar negeri suatu negara yaitu: 1) Konteks Internasional; 2) Perilaku Para Pengambil Keputusan; 3) Kondisi Ekonomi dan Militer Suatu Negara dan 4) Peran Politik dalam Negeri.

1. Faktor Eksternal: Tekanan Barat terkait Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam memahami perubahan politik luar negeri Sri Lanka, faktor eksternal atau disebut konteks internasional juga turut memainkan peran penting dalam menganalisis politik luar negeri suatu negara. Namun, William D. Coplin menyebut bahwa konteks internasional hanya akan memungkinkan untuk menganalisis politik luar negeri secara parsial, sebab didalamnya juga harus didukung faktor-faktor internal dengan menelaah proses politik domestik dari negara tersebut. Oleh karena itu, determinan konteks internasional akan membawa pembahasan ini pada posisi Sri Lanka dan hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional.

Kondisi demikian digambarkan melalui tindakan Amerika Serikat yang memanfaatkan forum UNHRC untuk melakukan tekanan berat kepada pemerintahan Mahinda Rajapaksa terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, Amerika Serikat menyatakan bahwa telah menemukan rekaman kejahatan perang seperti penembakan tanpa pandang bulu, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan kekesaran seksual, bahkan penolakan bantuan kemanusiaan melalui

berbagai film dokumenter (SM. Aliff,2015). Tekanan Amerika Serikat terhadap Sri Lanka mendorong sebagian besar negara-negara anggota UNHRC untuk melakukan tekanan yang sama dalam mendukung agenda demokrasi dan misi kemanusiaan.

Mahinda Rajapaksa tentu sangat terganggu oleh tekanan yang didapatkannya dari blok Barat terkait masalah kejahatan perang. Dalam hal ini, determinan konteks internasional digambarkan dari tekanan yang terus-menerus diberikan Barat terhadap Sri Lanka dan telah merugikannya tidak hanya secara citra politik namun juga berdampak pada kondisi ekonomi negara. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan politik luar negeri pro-Tiongkok ini tentunya juga ditunjukkan Mahinda Rajapaksa sebagai upayanya untuk mengejar dimensi yang berbeda dalam sistem internasional, khususnya saat menghadapi tekanan berat dari negara-negara Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok menjadi negara yang sangat dibutuhkan oleh Sri Lanka dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Dengan kegigihannya, Tiongkok justru hadir menyediakan dukungan yang tidak sederhana bagi pemerintah Sri Lanka. Dukungan positif dan progresif tersebut

sudah tercermin melalui posisinya sebagai pemasok senjata terbesar yang digunakan untuk membantu militer Sri Lanka dalam mengalahkan LTTE. Tidak henti disana, dukungan diplomatik Tiongkok juga diberikan di UNHRC untuk menentang penerapan resolusi yang kritis terhadap pemerintah Sri Lanka.

2. Faktor Presiden Mahinda Rajapaksa Sebagai Pengambil Keputusan Di Sri Lanka

Pada determinan ini, penulis akan menitikberatkan pembahasan pada pengaruh individu dalam merumuskan dan menjalankan politik luar negeri suatu negara. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan pengaruh Presiden Mahinda Rajapaksa sebagai pengambil keputusan tertinggi di Sri Lanka dalam melaksanakan politik luar negeri Pro-Tiongkok.

Secara tidak kebetulan, Presiden Mahinda Rajapaksa menganut ideologi *Sinhalese Buddhist Nationalist* dengan mengadopsi pola pikir yang sama dengan Perdana Menteri Bandaranaike. Munculnya orang yang mengadopsi ideologi yang sama ini karena Mahinda Rajapaksa juga dibesarkan dengan tradisi Buddha-Sinhala yang kuat.

Dengan latar belakang ini, Mahinda Rajapaksa bahkan menjunjung tinggi nilai-

nilai nasionalis dari ideologi *Sinhalase Buddhist Nationalist* sebagai rujukan utama dalam kerangka kerja pemerintahannya. Ideologi ini membuat Mahinda Rajapaksa teobsesi untuk melakukan solusi militer terhadap LTTE, karena negosiasi yang selama ini ditawarkan mengalami kebuntuan dan tidak menghasilkan solusi yang berarti.

Nilai-nilai *Sinhalase Buddhist Nationalist* juga merangsang persepsi Mahinda Rajapaksa untuk membenarkan cara-cara kekerasan dan penaklukan terhadap minoritas Tamil, demi melindungi etnis Sinhala. Kondisi ini semakin menjelaskan mengapa Mahinda Rajapaksa mengusung kebijakan yang secara drastis berbeda dari rezim-rezim sebelumnya, terutama dalam mengatasi masalah perang yaitu dengan mengangkat sentimen anti-negosiasi dan bersikap kritis tentang 'perdamaian dengan cara damai' (Syamika Jayasundara,2011).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pelaksanaan politik luar negeri yang Pro-Tiongkok ini didasari oleh obsesi Mahinda Rajapaksa untuk membawa kemenangan bagi etnis Sinhala dengan menumpas LTTE melalui militer. Tiongkok menjadi negara yang hadir untuk mendukung penuh solusi militer, bahkan menjadi penyedia dan pemasok utama peralatan

militer ke Sri Lanka. Disaat yang sama, negara-negara Barat justru menentang keras solusi militer yang diinginkan Mahinda Rajapaksa atas dasar HAM. Oleh karenanya, peralihan politik luar negeri Sri Lanka disebabkan karena Mahinda Rajapaksa memiliki keyakinan untuk dapat merealisasikan obsesinya dengan melaksanakan politik luar negeri dengan Tiongkok.

3. Faktor Krisis Ekonomi Sri Lanka

Selanjutnya, William D. Coplin menyebutkan faktor lain dalam determinan politik luar negeri yaitu kondisi ekonomi dan militer yang dihadapi suatu negara. Hal tersebut tentu erat kaitannya dengan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan ataupun bantuan dari negara lain. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka menjadi penting untuk melihat kondisi ekonomi Sri Lanka terutama pasca berakhirnya Perang Sipil tahun 2009. Sebab, hal ini tentu menjadi faktor pertimbangan bagi Sri Lanka dalam melaksanakan politik luar negerinya serta menjalin hubungannya dengan negara lain.

Pasca perang berakhir, pemerintah Sri Lanka mengalami kerugian besar dampak perang seperti kerusakan modal fisik dan manusia serta pengeluaran di bidang militer (Harishmawan Heryadi,2014). Kondisi ini tentunya harus

disikapi dengan bijak oleh pemerintah Sri Lanka, sebab kerusakan di bidang fisik juga akan menjadi penghambat proses pembangunan secara maksimal. Selain kerusakan di bidang fisik, krisis ekonomi Sri Lanka juga disebabkan oleh kenaikan anggaran pertahanan militer.

Kondisi ekonomi Sri Lanka juga semakin diperparah dengan sanksi ekonomi terkait masalah HAM yang diberikan negara-negara Barat yaitu seperti resiko kehilangan fasilitas GSP+ dan ditutupnya akses pasar ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, Sri Lanka juga terjebak dalam kontroversi politik Barat yaitu ketika Amerika Serikat meminta IMF untuk menunda permintaan Sri Lanka meraih pinjaman darurat dengan alasan kekhawatiran atas kondisi Hak Asasi Manusia selama fase akhir perang (Jayadeva Uyangoda,2010). Hal ini tentu membuat keadaan ekonomi Sri Lanka semakin buruk.

Penjelasan diatas menjadi dasar analisis ini yaitu kondisi ekonomi Sri Lanka telah mendorong Mahinda Rajapaksa untuk melakukan perubahan orientasi politik luar negerinya. Tiongkok hadir sebagai pendonor dan investor yang saat itu sangat dibutuhkan oleh Sri Lanka. Pergeseran ini terus berlanjut ketika kebijakan negara-negara Barat selalu mengaitkan isu Hak Asasi Manusia untuk

mendukung pengaturan ekonomi preferensial dengan Sri Lanka (Laksiri Jayasuriya,2013). Sebaliknya, Tiongkok justru hadir memberikan bantuan ekonomi, militer, dan diplomatik ke Sri Lanka tanpa melibatkan konsekuensi masalah Hak Asasi Manusia.

4. Faktor Partai Politik Sri Lanka *Freedom Party (SLFP)*

Pada determinan terakhir, William D. Coplin menyebut bahwa politik dalam negeri suatu negara juga memiliki peran signifikan dalam penyusunan politik luar negeri. Keberadaan partai politik juga menjadi tolak ukur yang penting dalam sistem negara demokrasi seperti Sri Lanka. Sebab, konsekuensi yang ditanggung sebagai negara demokratis adalah pemerintah tidak dapat merumuskan dan memutuskan politik luar negeri secara sepihak. Namun, tuntutan dan aspirasi yang berkembang di ranah domestik juga menjadi sumber pertimbangan yang penting. Oleh karenanya, politik luar negeri tidak hanya berkembang untuk menjawab dinamika politik yang ada, namun juga dituntut untuk *acceptable at home* (Nidia Masithoh,2018).

Dengan mempertimbangan basis dukungannya di parlemen, Mahinda Rajapaksa semakin percaya diri bahwa solusi militer dapat terealisasikan. Koalisi

partai pendukung Mahinda Rajapaksa yang disebut *United People's Freedom Alliance* (UPFA) yang didominasi oleh partai SLFP berhasil memenangkan 105 kursi, hampir mencapai 50 persen suara dibandingkan partai oposisi UNP hanya memenangkan 38 persen suara (Alan Kronstadt dan Bruce Vaughn, 2009). Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Mahinda Rajapaksa karena para pengkritik dari kalangan oposisi tidak mampu berbuat banyak sebab koalisinya mempunyai suara mayoritas dalam parlemen.

Seiring dengan perkembangan visi presiden dan parlemen yang selaras, secara otomatis kebijakan solusi militer semakin memiliki kekuatan untuk direalisasikan. Pada akhir tahun 2007, parlemen secara terbuka mendorong Mahinda Rajapaksa untuk keluar dari Perjanjian Damai dan menyerukan untuk mempercepat proses militer bagi LTTE. Elit domestik bahkan mendorong Mahinda Rajapaksa menyerukan adanya hubungan yang kongkrit dengan Tiongkok. Pergeseran aktor internasional di Sri Lanka ini disebabkan karena parlemen menyebut intervensi dan tekanan yang dilakukan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa dalam konflik justru menjadi penghalang untuk segala jenis solusi politik Sri Lanka (Syamika Jayasundara, 2011). Oleh karenanya,

pelaksanaan politik luar negeri Pro-Tiongkok ini dirancang oleh Mahinda Rajapaksa untuk mencapai agenda domestik.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor yang mendorong perubahan politik luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan Teori Determinan Politik Luar Negeri dari William D. Coplin.

Pertama, yaitu faktor konteks internasional digambarkan melalui sikap negara-negara Barat yang dipelopori Amerika Serikat memanfaatkan forum UNHRC untuk melakukan tekanan berat kepada pemerintahan Mahinda Rajapaksa terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, faktor *kedua* yang mendasari perubahan politik luar negeri ke Tiongkok dikarenakan Mahinda Rajapaksa menjadi pemimpin Sri Lanka yang menganut ideologi *Sinhalase Buddhist Nationalist*. Faktor *ketiga*, krisis ekonomi Sri Lanka sebagai dampak perang. Faktor terakhir adalah posisi SLFP sangat mendominasi parlemen sehingga keberadaannya juga sangat mempengaruhi perumusan politik luar negeri Sri Lanka.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Coplin, William D. (1971). *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago: Markham Publishing Company.

Mas'ood, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Sitepu, Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

Aliff, S. M. (2015). *Ethnic Conflict, War Crimes and Human Rights: Revisiting US Sponsored UNHRC Resolution Against Sri Lanka In 2013*. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.55.126>. [Diakses pada April 2021];

DeVotta, Nail. (2014). *Paties, Political Decay, and Democratic Regression in Sri Lanka*, dalam <https://www.researchgate.net/publication/263457244>. [Diakses pada November 2020];

Deyshappriya, N. R. (2016). *Sri Lanka–China Economic Relations in Comparative Perspective: Ample Room to Grow*, dalam <https://iki.lk/wp-content/uploads/2017/06/LKI-Working-Paper-Sri-Lanka-China-Economic-Relations-RD.pdf>. [Diakses pada Februari 2021];

Heryadi, Harishmawan. (2014). *Pembentukan Rezim Authoritarian Developmentalism Mahinda Rajapaksa Pasca Kemenangan Pemerintah Sri Lanka atas Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) tahun 2009*, dalam <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/20105/S56959Harishmawan%20Heryadi>. [Diakses pada November 2020];

Jayasundara, Syamika. (2011). *Conflict, War and Peace in Sri Lanka—Politics by other means?*, dalam http://repub.eur.nl/pub/34768/metis_177348.pdf. [Diakses pada Februari 2021];

Jayasuriya, L. (2013). *A new political regime post-2010 in Sri Lanka: A hybrid regime*, dalam <http://groundviews.org/2013/05/15/a-new-political-regimepost-2010-in-sri-lanka-a-hybridregime> [Diakses pada Mei 2021];

Kronstadt, K. A., & Vaughn, B. (2009). *Sri Lanka: Background and US Relations: RL31707. Congressional Research Service: Report*, 1-30, dalam <https://www.hsdl.org/?view&did=35779>. [Diakses pada Mei 2021];

Kumar, Surendra. (2017). *China's Strategic Engagement with Sri Lanka: Implications for India*, dalam <http://www.researchgate.net/publication/34042873>. [Diakses pada November 2020];

Lerski, G. J. (1974). *Sri Lanka Turns East. Asian Affairs: An American Review*, dalam <https://www.jstor.org/stable/30176290>. [Diakses pada Februari 2021];

Li, Yangfang. (2017). *Re-shaping the Sino-Sri Lanka's Economic Relations Under The Framework of the "21st Century Maritime Silk Road" Initiative*, dalam https://sci-hub.do/10.1007/978-981-13-2080-4_9. [Diakses pada Maret 2021];

Masithoh, N. (2018). *Pengaruh Politik Domestik terhadap Kebijakan Luar Negeri: Kasus Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) ke 19 Negara di Kawasan Timur Tengah* dalam <http://repository.unair.ac.id/75520/3/>

- [JURNAL Fis.HI.58%2018%20Mas%20p.pdf](#). [Diakses pada Mei 2021];
- Meligonda, Nayani. (2013). *Sri Lanka and The Commonwealth: How It All Began*, dalam <https://www.researchgate.net/publication/311648865>. [Diakses pada November 2020];
- Rajapakshe, R. S. (2015). *Similarity Of Interests Between Governments And Its Impact On Their Bilateral Relations: Case Study Of China-Sri Lanka Relations*, <https://www.researchgate.net/profile/Sampath-Rajapakshe-2/publication/290438295pdf>. [Diakses pada Maret 2021];
- Retno, Dewi. (2003). Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Turki Terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan PM Nicemettin Erbakan, dalam <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a88e5274a31e000658/FAB-Sri-Lanka.pdf> [Diakses pada November 2020];
- Samaranayake, N. (2011). *Are Sri Lanka's Relations With China Deepening? An Analysis Of Economic, Military, And Diplomatic Data*. *Asian Security*, 7(2), 119-146 dalam <https://scihub.do/10.1080/14799855.2011.581603>. [Diakses pada Februari 2021];
- Smith, Crish. (2003). *The Impact of Small Arms Availability and Misuse in Sri Lanka*, https://www.ecoi.net/en/file/local/1304792/1002_1257252185_2003-op11-sri-lanka. [Diakses pada November 2020];
- Uyangoda, Jayadeva (2010). *Sri Lanka in 2009 from Civil War to Political Uncertainties*, <https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2010.50.1.104>. [Diakses pada Februari 2021];
- Welikala, Asanga dan Harsha Kumarasingham. (2016). *Soulbury Plus: Conceptual Foundations and Institutional Features of a Parliamentary-Constitutional State* dalam <http://constitutionalreforms.org/wpcontent/uploads/2016/06/Working-Paper-4.pdf>. [Diakses pada Februari 2021];
- Wheeler, Thomas. (2012). *China and Conflict-affected States* dalam <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a88e5274a31e0000658/FAB-Sri-Lanka.pdf>. [Diakses pada November 2020];

